

Nama : MUTIA FARIDA NIKEN
NIM : 212374201001

Abstrak

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri, namun bukan merupakan pegawai negeri. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara berbagai profesi, termasuk Notaris, dalam memasarkan jasa mereka. Promosi Notaris melalui platform digital menjadi salah satu metode yang efisien dalam menjangkau klien potensial di era modern ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approach).

Bentuk promosi yang melanggar ketentuan, seperti promosi yang bersifat berlebihan atau menjanjikan hasil tertentu, penggunaan media sosial untuk mengiklankan jasa Notaris secara agresif, serta promosi yang dapat menyesatkan masyarakat terkait dengan kemampuan atau jangkauan layanan yang diberikan. Promosi jasa Notaris melalui platform digital telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak dipilih oleh para Notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan kemudahan informasi.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga martabat profesi, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan melalui pemeriksaan, penyelidikan, serta pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam UUJN. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran serius. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital, muncul permasalahan terkait dengan kesesuaian promosi Notaris dengan ketentuan dalam UUJN yang mengatur tentang perilaku, kode etik, dan larangan-larangan dalam profesi Notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital memberikan peluang besar bagi Notaris untuk memperluas jangkauan pasar, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar promosi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etik dan regulasi yang diatur dalam UUJN, seperti larangan promosi yang bersifat komersial atau berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk memahami dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam UUJN agar promosi melalui platform digital tetap dapat dilakukan secara sah dan etis.

Kata kunci : promosi Notaris, platform digital, UUJN, Kode Etik

Nama : MUTIA FARIDA NIKEN

NIM : 212374201001

Abstrack

A Notary, as a public official who carries out the profession of providing legal services to the public, needs to receive protection and assurance to ensure legal certainty. The guarantee of protection and legal certainty for the implementation of a Notary's duties has been regulated in the Notary Position Act No. 2 of 2014. As a public official, a Notary has the authority to create authentic deeds and is appointed and dismissed by the Minister, but is not a civil servant. The rapid development of digital technology has changed the way various professions, including Notaries, market their services. Promotion of Notaries through digital platforms has become an efficient method of reaching potential clients in today's modern era. This study uses a normative juridical method with a legal approach (status approach).

Forms of promotion that violate regulations, such as excessive or result-guaranteeing promotion, the use of social media to aggressively advertise Notary services, and promotions that mislead the public regarding the capabilities or range of services offered, have become issues. The promotion of Notary services through digital platforms has become one of the preferred marketing strategies for Notaries in facing technological developments and the public's need for easy access to information.

As a form of protection for the public and to maintain the dignity of the profession, the Regional Supervisory Council is responsible for overseeing and enforcing regulations through inspections, investigations, and imposing sanctions on Notaries who violate provisions in the Notary Position Act. Sanctions may include warnings, reprimands, or even revocation of the practice license for Notaries who commit serious violations. However, with the increasing use of digital media, problems arise regarding the alignment of Notary promotions with the provisions of the Notary Position Act, which regulates behavior, codes of ethics, and prohibitions within the Notary profession.

The research findings indicate that while digital promotion provides significant opportunities for Notaries to expand their market reach, there are several aspects that must be considered to ensure that such promotions do not conflict with the ethical principles and regulations outlined in the Notary Position Act, such as prohibitions against commercial or excessive promotion. Therefore, it is important for Notaries to understand and comply with the limitations established in the Notary Position Act so that digital promotions can be conducted legally and ethically.

Keywords: Notary Promotion, Digital Platforms, UUJN, Notary Ethics